

Id : 16274

Call Number : 347.016 APR A

Judul : Akibat hukum dan pertanggungjawaban notaris terhadap penerbitan dua salinan akta pernyataan keputusan rapat dengan nomor yang sama yang memuat hasil keputusan rapat umum pemegang saham yang berbeda (studi kasus terhadap penerbitan salinan akta PKR PT XYZ) / oleh Silvania Agaria Aprilie

Pengarang : APRILIE, SILVANIA AGARIA

Nim : 205060070

Kota : Jakarta

Tahun Terbit : 2011

Deskripsi Fisik : viii, 96 hal. lamp. 27 cm

Pembimbing : 1.Djajaputra, Gunawan

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.NOTARIS

Abstrak : abstrak (A) Nama : Silvania Egaria Aprilie; (NIM: 205060070) (B) Judul Skripsi : Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Penerbitan Dua Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dengan Nomor yang Sama Yang Memuat Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Berbeda (Studi Kasus Terhadap Penerbitan Salinan Akta Pkr PT. XYZ) (C) Halaman : viii + 96 + Lampiran + 2011 (D) Kata Kunci : Pertanggungjawaban Notaris, Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham (E) Isi : Notaris berperan membuat akta relaas dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS dilaksanakan sebagai salah satu cara bagi perseroan untuk menyampaikan laporan tahunan ataupun untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan aksi korporasi dan/atau kebijakan suatu perseroan. Masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah akibat hukum terhadap dua salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang diterbitkan dengan nomor yang sama yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berbeda? Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris terhadap penerbitan dua salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat PKR) dengan nomor yang sama yang isi salinannya berbeda tersebut? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang

didukung dengan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, akta notaris yang tidak dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini akta PKR yang dibuat dengan melanggar ketentuan formal sehingga menyebabkan minuta akta tersebut beserta salinan yang menjadi turunya kehilangan fungsinya sebagai akta otentik dan berubah menjadi akta di bawah tangan dan notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik atas permintaan para pihak, bukan merupakan pihak dalam akta sehingga karena itu pada prinsipnya notaries tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan kebenaran materil dari akta yang dibuatnya. (F) Daftar acuan : 31 (1983-2009) (G) Dosen Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., S.S. (H) Penulis : Sylvania Egaria Aprilie